

**IDEOLOGI POLITIK DILEMATIS
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
ANTARA GERAKAN TARBIYAH DAN PRAGMATISME**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ACH. BASYIR
NIM. 08370046**

PEMBIMBING:

Dr. SUBAIDI, S.Ag, M.S.i

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAH HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Kehidupan partai politik di Indonesia hanya cenderung mengedepankan kepentingan politik praktis semata dan mengenyampingkan pada nilai ideologi. Fenomena ini mulai terlihat jelas pada pemilu 2014 ketika partai-partai politik membuang jauh-jauh persaingan antar partai demi merebut kekuasaan. Partai-partai Islam dan sekuler yang sebelumnya menjadi lawan, kemudian bergabung menjadi kawan. Berbagai partai-partai politik yang awalnya merupakan partai yang memiliki basis ideologi dan beridentitas sebagai partai kader malah bergeser menjadi partai yang pragmatis. Bahkan, kasus koalisi dengan jarak ideologi yang berbeda seperti PDIP sebagai partai nasionalis menjalin koalisi dengan partai PPP dan PKS yang mana kedua partai tersebut menjadikan Islam sebagai basis ideologinya. Selain itu, di beberapa daerah terjadi koalisi yang secara akal sehat sangat bersebrangan antara PKS dengan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang secara formal PDS merupakan partai umat nasrani. Oleh karena itu, penulis menganggap penting meneliti hal ini lebih lanjut.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah: ideologi politik apa yang menjadi pijakan PKS? dan apakah dampak ideologi politik PKS dilematis seiring dengan perkembangan sistem kepartaian di PKS?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan dasar penelitian fenomenologis dan bersifat diskriptif analitis. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Habitus dan Arena (*Habitus and Field*) dalam Ideologi Politik Pragmatis.

Penelitian ini menemukan bahwa, partai politik yang memiliki latar belakang ideologi Islam seperti PKS lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis daripada nilai ideologi yang dimilikinya. Sehingga dimana partai tersebut yang pada awalnya berbasis religius (islam) dan merupakan partai doktriner, kini berbalik arah semakin mendekati diri dan terbuka pada partai yang berideologi sekuler ataupun nasionalis. Hal itu dilakukan demi kepentingan pragmatis dan upaya mendapatkan meja kekuasaan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. ACH. BASYIR

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ACH. BASYIR
NIM : 08370046
Judul : Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

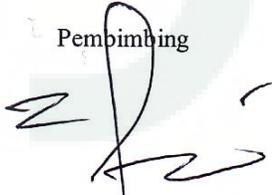
Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Dzulhijjah 1435 H

22 September 2014 M

Pembimbing


Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si
NIP.19750517 200501 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACH. BASYIR
NIM : 08370046
Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 September 2014

Saya yang menyatakan,



Ach. Basvir
Nim: 08370046



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02 /K.JS-SKR/PP.00.9/2065/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : IDEOLOGI POLITIK DILEMATIS PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA (PKS) ANTARA
GERAKAN TARBIYAH DAN
PRAGMATISME

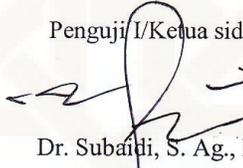
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ACH. BASYIR
NIM : 08370046
Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Oktober 2014
dengan nilai : 92 (A-)

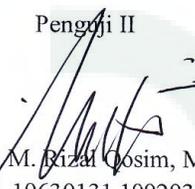
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

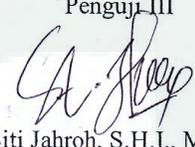
Penguji I/Ketua sidang,


Dr. Subandi, S. Ag., M.Si.
NIP.19710802 200604 2 001

Penguji II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji III


Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 7 Oktober 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Nuzulnadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197107199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	b	be
ت	Ta>'	t	te
ث	Sa>'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	H)a>'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra>'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Si>n	s	es
ص	Syi>n	sy	es dan ye
ض	S{a>d	s}	es (dengan titik di bawah)

ط	D{a>d	d{	de (dengan titik di bawah)
ظ	T{a>’	t}	te (dengan titik di bawah)
ع	Z{a>’	z}	zet (dengan titik di bawah)
غ	‘Ayn	‘	koma terbalik
ف	Gayn	g	ge
ق	Fa>’	f	ef
ك	Qa>f	q	qi
ل	Ka>f	k	ka
م	La>m	l	‘el
ن	Mi>m	m	‘em
و	Nu>n	n	‘en
ه	Waw	w	we
ء	Ha’	h	ha
ي	Hamzah	‘	apostrof
	Ya>	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>H}ikmah</i>
علة	ditulis	‘illah

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fit}ri</i>

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fath}ah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
اِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذکر		ditulis	<i>zūkira</i>
اُ	<i>d}ammah</i>	ditulis	u
يذهب		ditulis	<i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif جاهلية	ditulis	<i>Ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	D}ammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd}</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fath}ah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

.....وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

.....Dan saling menasehati untuk kebenaran dan saling

menasehati untuk kesabaran

(Al-Quran: surat Al-Asr ayat 3)

Kebahagiaan pada hakikatnya adalah mati dengan khusnul

khatimah

PERSEMBAHAN

Secara khusus, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- *Bapak dan ibu tercinta, yang tak henti-hentinya mendidik, membimbing, dengan penuh kesabaran dan doa. semoga Semua kasih sayang mereka mendapat balasan yang takterhingga dari- Allah SWT.*
- *Guru-guru ku K.H. Mukhtar Lubis, Hj.Muyassaroh ,fitrotul qoiyimah, Sariroh. dll*
- *Kakak ku terhormat dan **Shofiyah** yang selalu mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- *Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tempat dimana banyak hal tak terhingga bisa saya dapatkan, serta tak lupa untuk bapak para dosen, yang telah bekerja keras untuk mencerdaskan anak didiknya.*
- *Tak lupa juga untuk semua sahabat Prodi Jinayah Siyasah. Khoiri, alkahfi.*

.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tidak pernah lekang memberikan segala bentuk limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua, termasuk dengan selesainya skripsi ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa penulis tidak memiliki daya dan upaya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini tanpa bantuan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW., yang telah mengangkat umat manusia dari zaman kejahilan menuju zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tidak lupa penulis menghaturkan ta'zim dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A, Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah dengan sangat sabar memberikan pengarahan. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan akan dibalasan oleh Allah SWT, dengan bertambahnya kemuliaan dunia hingga ke akhirat kelak.
6. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag, M. Ag, Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si Selaku Seketaris Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua dan saudara-saudara yang tidak bisa disebutkan semua yang penulis senantiasa cintai dan sayangi.

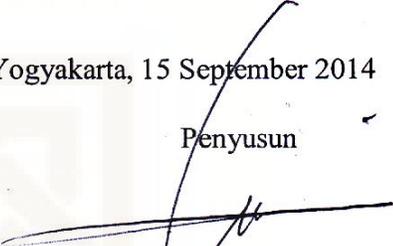
Demikian pula segenap pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah senantiasa membalaskan pahala atas keikhlasan bantuannya.

Akhirnya, penulis berharap, apapun adanya skripsi ini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, semoga dapat memberikan bermanfaat bagi

pengembangan keilmuan umat manusia. Saran dan masukan tetap penulis harapkan demi pengembangan keilmuan penulis dan pengembangan pengetahuan secara umum. Akhirnya, kepada Allah penulis tetap selalu memohon dan meminta pertolongan serta bimbingan-Nya.

Yogyakarta, 15 September 2014

Penyusun



ACH. BASYIR
NIM. 08370046

DAFTAR ISI

HALAMN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Batasan dan Rumusan Masalah	09
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	09
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TEORI HABITUS DALAM IDEOLOGI POLITIK	
PRAGMATIS	20

A. Ideologi	20
B. AD-ART Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	22
C. Teori Agen dan Struktur	54
D. Habitus dan Arena (<i>Habitus and Field</i>)	56
E. Tarbiyah sebagai Proses Membangun Habitus Kolektif	62
BAB III : PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	42
A. Ideologi PKS	75
B. Dilematis antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatis	79
1. Elitis vs Populis	85
2. Dogmatis vs Pragmatis	91
3. Eksklusif vs Inklusif	97
C. Dampak Ideologi Dilematis PKS	102
1. Perubahan Perilaku Individu	102
2. Perubahan Perilaku Politik	103
3. Deideologisasi atau Ideologi yang Cair	104
4. Pragmatisme Finansial	104
BAB IV : PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa awal reformasi, politik kepartaian di Indonesia memperlihatkan satu fenomena yang tampak bertolak belakang. Kondisi ini dapat dilihat menjelang pemilu tahun 1999, dimana partai-partai politik diberikan kebebasan untuk menegaskan warna ideologinya. Namun, sejak pemilu 2004 dan sepanjang pelaksanaan pemilu pada 2005-2009, posisi ideologi politik sebuah parpol seakan berkurang maknanya. Para elit politis, dengan mengenyampingkan ideologi partainya masing-masing, hanya duduk bersama menyatukan persepsi dengan waktu yang relatif singkat.

Sistem pemilu yang diselenggarakan sejak era reformasi telah melahirkan puluhan partai politik yang memenuhi persyaratan *electoral threshold*. Banyaknya jumlah partai tersebut, disamping merupakan sinyal positif atas keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya membangun karakter nasional bangsa melalui perjuangan politik partai, ternyata juga membawa berbagai masalah yang tidak diharapkan. Salah satu persoalan serius yang muncul adalah semakin kaburnya batas ideologi antar partai, dikarenakan baik partai kiri maupun kanan semakin bergeser ke tengah, dan juga terjadi pergeseran ideologi seiring dengan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia.¹

¹ "Urgensi Perbedaan Ideologi Dalam Partai Politik", (<http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/07/16/urgensi-perbedaan-ideologi-dalam-partai-politik/>). Akses 28 September 2013.

Pembentukan nilai ideologi partai politik sangat lemah dalam praktik politik keseharian. Partai lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis dari pada nilai ideologis. Implikasinya, koalisi yang terbentuk lebih berbasis pada isu pragmatis partai politik dan melupakan ideologi formal yang dimiliki. Fenomena yang terdapat di Indonesia saat ini adalah berlomba-lombanya partai-partai politik untuk menginkluskasikan diri dan mewartakan semua basis pemilih, sedangkan ideologi partai tidak lagi menjadi variabel sentral dalam pembuatan keputusan di internal partai, dan ideologi partai tidak menjadi tolak ukur lagi dalam menyusun suatu kebijakan. Hal ini menjadi suatu fenomena yang menarik diteliti, dimana partai yang berbasis religius (islam) yang merupakan partai doktriner saat ini semakin mendekati diri dan terbuka pada partai yang berideologi sekuler ataupun nasionalis sehingga menjadi partai yang pragmatis.

Keterbukaan terhadap partai yang memiliki platform berbeda menandakan bahwa jarak ideologi di antara partai-partai politik saat ini semakin menyatu tak ada penyekat di antara partai-partai yang memiliki ideologi partai yang berbeda. Fenomena ini disebut oleh Giovanni Sartori sebagai kecenderungan sentripetal dalam partai politik.² Menurut Sartori, dalam demokrasi yang sudah terinstitusionalisasi secara baik, ideologi partai akan mengarah ke tengah dan membuat penyekat ideologi antar partai akan semakin tidak jelas. Dengan kata lain, partai-partai politik akan semakin pragmatis dalam upayanya mendapatkan kekuasaan.³

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm.128

³ *Ibid.*, hlm. 128.

Fenomena ini mulai terlihat jelas pada pemilu tahun 2004. Berbagai partai politik dengan variasi ideologinya bersaing keras dalam pemilu legislatif dan presiden. Ketika pemilu berakhir, tampak jelas partai-partai politik itu membuang jauh-jauh persaingan yang telah berlangsung, seolah mereka mengabaikan sama sekali hasil-hasil pemilu dan bersatu dalam membentuk pemerintahan inklusif yang melibatkan semua pihak. Hal ini dapat dilihat pada Kabinet Indonesia Bersatu yang dibentuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono yang berhasil memenangkan pilpres pada saat itu.⁴ Dalam kabinet tersebut terdapat partai-partai Islam yang merupakan lawan sebelumnya kemudian bergabung dengan partai-partai sekuler menjadi kawan. Partai politik yang awalnya merupakan partai yang memiliki basis ideologi sebagai partai doktriner yang beridentitas sebagai partai kader mulai bergeser menjadi partai yang pragmatis dan menunjukkan jati diri sebagai partai massa.

Jelas bahwa partai-partai di Indonesia semakin bergerak ke tengah dalam spektrum ideologi. Relasi ideologi partai yang satu dengan yang lainnya tidak seperti pada masa orde lama, dimana jarak ideologi partai pada saat itu disebut Sartori dalam klasifikasi sistem kepartaian pluralisme ekstrem saat ini telah berubah ke sistem kepartaian yang cenderung lebih moderat, dan juga pergeseran ideologi partai. Contoh kasus koalisi dengan jarak ideologi yang berjauhan terjadi dalam Pilkada Kota Yogyakarta, PDIP sebagai partai nasionalis menjalin koalisi dengan PPP dan PKS yang menjadikan Islam

⁴ Hanta Yuda AR. *Presidensialisme Setengah Hati "Dari dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 34.

sebagai ideologi formal partai. Bahkan di beberapa daerah, partai Islam seperti PKS juga menjalin koalisi dengan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang secara formal adalah partai umat Nasrani. Demikian juga di tingkat nasional, pada pilpres 2004 putaran kedua, PPP juga menjalin koalisi dengan PDIP dalam mencalonkan Megawati Soekarnoputri.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi ideologi partai politik sangat lemah dan koalisi yang dibangun parpol lebih dominan sebagai ikatan koalisi pragmatis.

Fenomena yang terjadi di tatanan kehidupan partai politik Indonesia tersebut, bukan saja membuat rakyat kesulitan melihat perbedaan kontinum partai kiri-kanan, namun yang lebih esensial adalah semakin jauh jarak partai itu sendiri dari basis historis pendiriannya dan juga perlu dipertanyakan lagi akan konsistensi ideologi partai yang telah menjadi nafas perjuangan partai. Wilayah keyakinan atas nilai-nilai yang akan diperjuangkan melalui suatu sistem kekuasaan menjadi semakin sempit, tidak variatif, dan mereduksi peluang kompetisi pencarian alternatif-ideologis. Kepercayaan masyarakat kepada partai-partai yang membawa ideologi sebagai asas perjuangan partainya, misalnya saja partai berbasis Islam semakin berkurang. Hal ini menyebabkan semakin kecilnya perolehan jumlah suara yang didapatkan sebagian besar partai-partai Islam selama pemilu beberapa tahun belakangan.

Belajar dari perjalanan sistem kepartaian di Indonesia hingga hari ini, salah satu partai politik Islam yang memperoleh suara paling besar di antara partai politik Islam lainnya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai

⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

membaca situasi politik kepartaian yang terjadi di Indonesia. Kemunculan atau lahirnya Partai Keadilan Sejahtera memberikan makna tersendiri bagi berdirinya kembali partai Islam di Indonesia yang menandakan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam masih memberikan kepercayaan yang besar pada partai Islam. Selanjutnya akan dibahas lebih jauh awal terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera yang dulunya bernama Partai Keadilan.

Berdirinya Partai Keadilan (PK) bisa dikatakan berbeda dengan partai lainnya baik partai yang berbasis ideologis maupun yang non ideologis. Kelahiran Partai Keadilan berangkat dari musyawarah yang cukup panjang, yang membahas tentang penyikapan terhadap era reformasi yang membuka keran kebebasan untuk berekspresi diantaranya mendirikan partai politik. Persoalan mendirikan partai adalah agenda yang hangat dibicarakan kalangan tarbiyah, sebagian mengatakan perlu mendirikan partai politik dan sebagian menyatakan tidak perlu.

Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera tidak bisa lepas dari peranan Partai Keadilan. Pada pemilu 1999 Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu. Hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electoral threshold*, sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang.⁶

Kegagalan ini menyebabkan Partai Keadilan (PK) bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Beberapa pengamat menilai bahwa

⁶ Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, ed., *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi Dan Program 2004-2009* (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 230.

salah satu faktor kekalahan partai Islam pada pemilu 1999 adalah parpol Islam belum menampakan inklusivitasnya. Indikasi ini diperkuat oleh kritikan Van Zorge, yang menilai Partai Keadilan sebagai modernis-eksklusif (*modernist-exclusivist*). Kecendrungan terlalu besar ke arah eksklusif akan menyulitkan partai ini untuk maju, dan bahayanya bagi PK akan potensial untuk 'layak dimusuhi' oleh kawan-kawan penganut Islam Kultural. Celakanya, justru eksklusifisme adalah lawan paling potensial bagi cita-cita membangun watak bangsa. Watak bangsa tidak mungkin dibangun paralel dengan eksklusifisme. Dibalik kritikan itu Van Zorge juga memberikan penilain "inklusif". PK yang diakuinya sebagai partai *reformist* dan *unique* itu, disebut-sebut sebagai partai yang gampang berkompromi dan bekerja sama ketika berhadapan dengan realitas politik. "*Partai Keadilan has demonstrated a willingness in the past to compromise and work within the confines of political realities,*" ujar Van Zorge.⁷ Untuk itu, PK kedepannya memiliki prospek untuk menjadi partai inklusif dan ini terlihat sejak transformasi Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Perlunya sikap inklusif ini juga dibenarkan oleh R William Liddle, menurutnya partai-partai inklusif dianggap lebih otonom atau mandiri, sebab pengurusnya tidak dikuasai oleh satu kekuatan sosial, seperti organisasi agama atau kelompok etnis tertentu. Partai-partai semacam itu juga lebih pantas dan fleksibel, sebab pengurusnya tidak dihalangi oleh komitmen-komitmen sempit dalam merangkul berbagai kekuatan sosial baru. Lagi pula,

⁷ Husain Al-Banjari, *SA, ET, dan Prospek Partai Keadilan*, dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, ed., *Mengapa Partai Islam Kalah?* (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 276.

selama ada pemilu yang “luber”, partai-partai inklusif dirangsang terus untuk menambah jumlah pengikutnya dengan cara memasukan golongan baru, sehingga menjadi lebih inklusif lagi.⁸

Sikap inklusif ini dijawab oleh PKS dengan melakukan rekrutmen anggota dari orang-orang yang berlatar belakang non-tarbiyah. Bahkan pada pemilu 2004, partai PKS menjaring lebih dari 30 calon legislatif non muslim.⁹ Disamping itu, PK juga merekrut orang-orang non muslim sebagai anggotanya. Hal ini terlihat dari di sahkanya DPD Partai Keadilan Piniai pada tanggal 5 Juni 2002, yang mayoritas pengurusnya beragama kristen.¹⁰ Para pimpinan PKS juga memberikan kesempatan kepada tokoh agama Hindu untuk menjadi anggota legislatif. Kesempatan mengemuka pada mukernas di Bali pada 1-3 Februari 2008, ketika itu Fahri Hamzah menawari Ida Pedanda Sebali Tianyar seorang tokoh Hindu Bali untuk menjadi caleg dari partainya.¹¹

Dalam perspektif ini, perlu ditelaah lebih lanjut, *pertama*, PKS adalah partai baru yang berbeda dari partai politik kebanyakan; *kedua*, PKS berasal dari komunitas muslim baru di Indonesia yang dalam perkembangan kepartaian saat ini ada kesan ideologi yang diusungnya semakin bergerak ke tengah. PKS memilih untuk menjadi partai politik yang terbuka atau bisa

⁸ R. William Liddle, *Partisipasi Dan Partai Politik*. Penerjemah Tim Pustaka Utama Grafiti (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 14.

⁹ Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2007.), hlm. 112.

¹⁰ Cahyadi Takariawan, *Bukan Di Negeri Dongeng Kisah Nyata Para Pejuang Keadilan*, (Jakarta: Syaamil, 2003), hlm. 124-126.

¹¹ “Partisipasi Politik Non Muslim Dalam Partai Politik Islam (Analisa Terhadap PK Sejahtera)” (<http://garammanis.com/2010/12/21/partisipasi-politik-non-muslim-dalam-partai-politik-islam-analisa-terhadap-pk-sejahtera/>). Akses 28 September 2013.

dimaknai bahwa Partai Keadilan Sejahtera saat ini memilih menjadi partai yang plural, menerima perbedaan dan keberagaman. Tentunya ini bersebrangan dengan visi umum dan visi khusus Partai Keadilan Sejahtera yang secara resmi menyatakan akan mengarahkan partai dakwah itu untuk memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; akan mengarahkannya menjadi kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang; akan mengarahkannya sebagai kekuatan yang menggalang dan memelopori kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *Rahmatan lil-Alamin*; akan mengarahkannya sebagai akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.¹²

Menjadi sebuah keharusan dan penegasan bahwa garis ideologi suatu partai seharusnya menjadi panduan partai tersebut menjawab berbagai persoalan yang ada, dan setiap kebijakan partai dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat. Penyimpangan kebijakan dari garis ideologinya tentu akan mengakibatkan masalah internal bahkan dapat membuat ketidakpercayaan pengikutnya. Konsistensi menjadi sangat berarti dalam menjalankan kebijakan partai selaras dengan garis ideologi yang menjadi asas perjuangan dari Partai Keadilan Sejahtera.

¹² Partai Keadilan Sejahtera, Platform Kebijakan Pembangunan Falsafah Dasar Perjuangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Jakarta: 2008.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Ideologi Dilematis Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Ideologi politik seperti apa yang menjadi pijakan PKS?
2. Apakah dampak ideologi politik Partai Keadilan Sejahtera dilematis seiring dengan perkembangan sistem kepartaian di Partai Keadilan Sejahtera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan secara umum dan khusus, yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan umum

Untuk menelaah perkembangan politik partai Islam di pentas perpolitikan nasional yang terus berubah-ubah.

b. Tujuan khusus

- 1) Untuk menjelaskan arti penting ideologi sebagai asas perjuangan Partai Keadilan Sejahtera dalam sistem kepartaian di Indonesia.

- 2) Untuk mengkaji ada tidaknya perubahan ideologi partai yang terjadi dalam Partai Keadilan Sejahtera.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ditinjau secara akademik dan praktis yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

- 1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui Ideologi Dilematik Politik Partai Keadilan Sejahtera.
- 2) Memperkaya *khasanah* kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan.
- 3) Menjawab fenomena sosial politik yang ada.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan baik bagi pengambil keputusan publik maupun kalangan aktivis politik, khususnya islam dalam melakukan pembaruan tatanan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi proses demokrasi di masa depan.
- 2) Hasil penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain.

D. Kajian Pustaka

Banyak buku dan makalah yang membahas tentang dilematis ideologi politik PKS, diantaranya Buku Burhanuddin Muhtadi, yang awalnya merupakan tesis di Australia's National University ini mencoba melihat PKS dengan menggunakan perspektif gerakan sosial. Mirip dengan yang dilakukan peneliti-peneliti Barat, misalnya Quintan Wictorowicz, Charles Kurzman, Carrie Wickham dan Emmanuel Karegiannis, yang menggunakan teori-teori gerakan sosial untuk membedah gerakan salafisme, Hizbut Tahrir, dan Ikhwanul Muslimin.¹³

Menurut Burhanuddin, yang menarik dari PKS adalah strategi politiknya yang dilematis. Bagaimanapun, PKS adalah partai eksklusif, dengan basis tradisional kaum muda, terdidik, dan masyarakat perkotaan. Tapi, kemudian coba “bertaruh” untuk menjadi partai inklusif (terbuka). Strategi PKS dengan menjadi partai terbuka secara serius diawali dari Mukernas PKS, 1-3 Februari 2008 di Bali. Ini disebut-sebut menjadi lompatan sejarah PKS. Dengan logo Mukernas yang mirip pura, nuansa tradisional dan lokalitas Bali yang mayoritas beragama Hindu begitu kentara. Di sini, pekik takbir yang biasanya mewarnai acara-acara PKS seperti “hilang”. Malah, yang bergemuruh adalah tepuk tangan peserta yang kadang diselingi dengan pekik “merdeka!”

Menurut Burhanuddin, sebagai partai yang dilahirkan dari rahim gerakan dakwah, tarik-menarik kubu harakah dengan hizb (partai) memang

¹³ Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS, Suara dan Syariah*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).

tak terhindarkan. Pilihan menjadi partai politik kadangkala memaksa PKS untuk bermain dalam dunia abu-abu yang penuh kompromi, negosiasi, dan godaan kekuasaan. Tidak semua kader bisa “menikmati” langgam politik seperti itu, terbukti dengan kritik-kritik keras dari sesepuh partai, seperti Abu Ridho, Mashadi, Daud Rasyid, dan Ihsan Tanjung. PKS, kata Burhanuddin, ibarat mendayung di antara “dua karang”, yakni, memilih strategi partai sebagai representasi basis sosial atau logika kompetisi elektoral. Apabila PKS ingin mengedepankan representasi basis sosial partai, maka menjadi partai ideologis adalah pilihan tepat. Sebaliknya, bila ingin muncul sebagai pemenang pemilu, pilihan yang paling realistis adalah mengubah orientasi dan perilaku politik PKS menjadi partai inklusif. Tapi, secara teoretis maupun praktis, dua pilihan sebagai partai ideologis atau elektoralis sulit dikompromikan.

Dilema PKS, dari studi Burhanuddin ini, memberikan gambaran pergeseran strategi Islam politik ke arah strategi politik lebih terbuka. Perolehan suara partai-partai ideologis (partai-partai Islam) yang merosot, karena pemilih beralih ke partai-partai nasionalis, menjadi alasan kuat PKS memilih jalan terbuka. Partai-partai berbasis ideologis-eksklusif tampak sepi peminat.

Buku lainnya adalah buku yang berjudul *PKS & Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir & Turki*.¹⁴ Secara khusus buku ini berupaya menanggapi perdebatan mengenai apakah mereka yang Islamis bisa

¹⁴ Anthony Bubalo, dkk., *PKS & Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir & Turki*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012).

menjadi demokrat dengan membalikkan pertanyaan yang biasa mengenai Islamisme dan demokrasi, yaitu “apa yang akan kaum Islamis lakukan terhadap demokrasi?” Ketiga penulis dengan menelaah PKS (Partai Keadilan sejahtera) di Indonesia, Al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir dan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) tidak berusaha membuktikan atau membantah apakah kaum Islamis dapat menjadi ‘demokrat yang gigih’. Karena itu tujuan telaah di buku ini adalah untuk memahami bagaimana konteks politik membentuk respons kaum Islamis, khususnya untuk memahami apa dampak ruang politik demokratis dalam tingkatan yang lebih besar terhadap perkembangan ide dan aktivisme kaum Islamis. Dengan kata lain, buku ini berupaya menjawab pertanyaan, “apa yang demokrasi perbuat terhadap kaum Islamis?”

Buku lainnya adalah *Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elite PKS*.¹⁵ Buku ini adalah replik penggugat asli (prinsipal) dari Yusuf Supendi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didokumentasikan. Jadi jangan mengira bahwa buku ini berisi tulisan dan ulasan Yusuf Supendi membongkar kebobrokan internal PKS. Dalam buku ini dapat dibaca kebobrokan dan konflik internal PKS yang selama ini tidak diekspos ke publik.

E. Kerangka Teori

Ideologi bagi partai adalah suatu idealisme yang menjadi garis besar bagi kegiatan dan organisasi partai. Dapat dikatakan identitas partai

¹⁵ Yusuf Supendi, *Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elite PKS*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012).

Indonesia secara umum kurang kuat dikarenakan masih mencari jati dirinya. Sangat sulit membedakan partai-partai Indonesia selain dengan mengelompokkan mereka dalam kelompok partai agamis dan sekuler. Dari segi ini pun terkadang ada partai yang terlihat berusaha menggabungkan kedua unsur ini. Lemahnya ideologi bahkan bisa dilihat dalam partai-partai utama. Partai besar, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pun masih amat bergantung pada karisma Mbak Mega (Megawati Soekarno Putri) untuk menarik pendukung. Padahal, demi kelangsungan organisasinya, partai ini seharusnya sudah bisa “mengalihkan” dukungan terhadap pemimpin menjadi dukungan terhadap identitas dan organisasi partai.

Dilihat dari kacamata organisasi fisik, partai-partai kita juga masih sangat lemah. Di tingkat masyarakat, hanya partai-partai besar yang mampu terus eksis di luar masa kampanye dan pemilu. Kebanyakan partai masih “tidur” kalau tidak ada pemilu, dan cabang-cabang mereka juga tutup. Kemampuan untuk tetap aktif sangat bergantung pada kapasitas cabang partai dan komitmen pemimpin ditingkat lokal.

Dengan kapasitas organisasi yang seperti ini, sangat sulit bagi partai politik Indonesia membangun hubungan yang stabil dengan para pendukung dan anggotanya. Dari segi rekrutmen, partai-partai besar biasanya hanya mengandalkan pada suara yang didapat pada pemungutan suara sebelumnya. PKS memprioritaskan rekrutmen anggota baru dan terlihat lebih mampu untuk konsisten menjalankan program rekrutmen.

Definisi partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pemikiran dan orientasi yang hendak dicapai bisa dikonsolidasikan. Menurut Prof. Miriam Budiardjo, partai politik dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya.¹⁶

Selanjutnya, Carl J. Friedrich, memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan adil kepada para anggotanya. Sedangkan menurut Soltau definisi partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.¹⁷

Sistem kepartaian adalah “pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik.”¹⁸ Sistem kepartaian

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm. 403-404.

¹⁷ Ramlan Surbakri, *Op.Cit.*, hlm. 116.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 116.

bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik.

Partai politik berfungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh partai politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yaitu ikut serta dalam pemilihan umum. Sedangkan untuk partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologis oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun diktatorial individu (fasis). Untuk melaksanakan fungsi itu, partai politik juga melakukan kegiatan meliputi seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan eksekutif).¹⁹

Dari beberapa konsep yang telah dijelaskan di atas, penulis melihat terdapat fenomena menarik dalam sistem kepartaian di Indonesia. Perkembangan sistem kepartaian yakni sistem multipartai yang saat ini diterapkan di Indonesia, mengindikasikan bahwa secara umum partai politik di Indonesia telah mengalami pergeseran jarak ideologi dan pergeseran makna ideologi. Pemilu masa reformasi menunjukkan jarak ideologi antar partai yang semakin dekat. Jelas bahwa partai-partai di Indonesia semakin bergerak ke tengah dalam spektrum ideologi.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 116-117.

Pada Pemilu tahun 2004 menunjukkan semakin kaburnya batas ideologi antar partai, dikarenakan terjadinya pergeseran sistem kepartaian dimana arah perilaku partai politik bergerak menuju ke tengah dan juga terjadi pergeseran ideologi seiring dengan sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia. Partai-partai politik semakin memperlihatkan keinklusifannya, dan mulai bergabung dengan partai politik pemenang Pemilu melalui koalisi partai dalam kabinet walaupun visi-misi partai tampak jelas terdapat perbedaan namun mereka semakin kompak bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan.

Perubahan sistem kepartaian semakin jelas pada pada Pemilu 2009. Ideologi partai akan mengarah ke tengah dan membuat penyekat ideologi antar partai akan semakin kabur dan tidak jelas. Dengan kata lain, partai-partai politik akan semakin pragmatis dalam upayanya mendapatkan kekuasaan.

Berikut ini disajikan bagan alur dari kerangka berfikir pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.



Gambar 1.1 Bagam Alur Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian Deskriptif kualitatif. Metode Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian. Objek penelitian dalam hal ini mengenai ideologi dilematis politik dalam Partai Keadilan Sejahtera.

Dasar penelitian dalam penelitian ini menggunakan dasar penelitian fenomenologis, dengan paradigma definisi sosial ini akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan interpretasi, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi tersebut sampai mendapatkan pengetahuan tentang ideologi dilematis politik Partai Keadilan Sejahtera. Penelitian kualitatif mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat bersifat sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka dalam pembahasan ini dibagi menjadi lima yang terdiri dari beberapa sub bab.

Bab *pertama*, Pendahuluan. Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

Bab *kedua*, Teori Habitus dalam Ideologi Politik Dilematis. Bab ini berisi mengenai teori habitus dalam ideologi politik dilematis.

Bab *ketiga*, PKS. Pada bab ini dijelaskan mengenai ideologi politik PKS, dilematis antara gerakan tarbiyah dan pragmatisme, dan dampak ideologi dilematis PKS terhadap pelaku elit politik PKS.

Bab *keempat*, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari analisis kasus secara umum yang dilanjutkan dengan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aparatur negara masih merupakan satu-satunya sumber terpenting bagi munculnya para politisi, terutama kepala pemerintahan daerah ditingkat pusat maupun dalam bidang legislatif yang berorientasi pada pengakumulasian kapital dan privatisasi sektor untuk keuntungan pribadi. Regularisasi kebijakan di Indonesia masih bersifat “jual-beli di pasar gelap”. Prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik hanyalah rekayasa belaka.

Berdasarkan fenomena demokrasi tersebut menyebabkan PKS sulit memenangkan pertarungan melawan dominasi partai politik. PKS juga tidak bisa membangun kolektifitas politik dakwah bersama ‘Parpol Islam’ lainnya dalam upaya mengislamisasikan pemerintahan. Fenomena partai terbuka yang kian digemakan PKS pun tak mampu merubah citra identitas awal mereka sebagai partai dakwah itu sendiri.

Tragedi yang menimpa LHI tidak terlalu signifikan menghancurkan sistem penjagaan kaderisasi partai karena masih terlihat cukup solid. PKS cukup diuntungkan dengan sistem *jama'ah* yang mengedepankan kepercayaan kepada pemimpin dalam menentukan berbagai macam kebijakan bagi setiap kader. Sikap ini terus dipertahankan hingga mengakar kuat dalam

aktivitas *jama'ah*. Namun di lain kesempatan, kondisi tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan.

Kondisi *Jama'ah* mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika memasuki pasca-reformasi. Pada fase ini gagasan terhadap ideologi Tarbiyah dapat terseleksi, mengalami proses deviasi atau menjelma menjadi sebuah praktik politik yang berbeda dengan ide awalnya. Hal ini sangat jauh berbeda ketika *Jama'ah Tarbiyah* belum memasuki ranah politik praktis ketika aktivitas dakwah tidak disamakan dengan orientasi elektabilitas.

Ada dua hal yang mendasari perihal tersebut, yaitu; *Pertama*, secara tidak sadar, sistem *jama'ah Tarbiyah* memberikan peluang untuk menciptakan ideologi Tarbiyah sebagai satu-satunya asas tunggal yang telah menciptakan 'sakralisasi struktur kelas' tersendiri. Akhirnya kader terjebak pada kesadaran teknokratis yang telah mengondisikan ideologi untuk mempertahankan 'struktur' yang menekankan pada kelestarian sistem (*system maintenance*) yang dibuat dan dirubah oleh elite itu sendiri. Sistem ini juga memberikan peluang para elite untuk memberikan imbalan-imbalan sosial bagi mereka yang menjamin kesetiaan *massa* pada sistem tersebut. *Kedua*, menegaskan identitas kelompok, sistem kaderisasi PKS memagari kadernya dengan *group* dan *grid*. Sikap defensif dan resisten terhadap orang yang mengkritisi *jama'ah* dan pandangan yang bersifat *inward looking* bertujuan untuk menjaga kemurnian kelompok dari "penetrasi dunia luar" yang dianggap akan mengganggu stabilitas *jama'ah*.

Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan “*kegamangan ideologi*” ketika proses *deviasi ideologi* yang terjadi dikalangan kader mengakibatkan banyak diantara mereka yang secara tidak sadar menganggap bahwa ideologi Tarbiyah adalah sesuatu yang mutlak dan bersifat *secret*, padahal ideologi Tarbiyah adalah jalan untuk memahami Islam yang *syumuul* dengan cara mempelajari suatu kondisi sosial tertentu, untuk menciptakan suatu strategi berdasarkan *syari’at* dalam rangka mencapai *Daulah Islamiyah*.

Kondisi internal PKS yang sangat dinamis terbentuk karena PKS mengadopsi khasanah pemikiran Islam yang spektrumnya sangat luas dan mengalami perkembangan yang pasif selama berabad-abad. Dalam hal ini umat Islam di Indonesia, termasuk PKS, telah menjadi korban alur pikir dan politik linguistik Barat.

Jemaah Tarbiyah di masa lalu memulai kiprahnya ketika rezim Orde Baru yang otoriter sedang berkuasa, dimana negara menginfiltrasi dan mengintervensi seluruh partai politik, ormas, organisasi keagamaan, dan institusi apapun secara sempurna. Dengan berubahnya *Jemaah Tarbiyah* dari sebuah “gerakan bawah tanah” menjadi partai, sebagian besar paradigma yang valid dijadikan rujukan ketika di *mihwar tanzhimi* sudah tidak relevan lagi. Hal yang disoroti adalah pandangan keagamaan yang cenderung rigid dan sikap konfrontatif terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki ideologi yang berbeda. Di tahap *tanzhimi*, hal-hal tersebut relevan karena konteks waktu itu adalah membangun identitas dan militansi kader. Di masa itu istilah

thagut sangat lazim digunakan sebagai label untuk pemerintah atau kekuatan-kekuatan lain yang dipandang tidak berpihak kepada Islam dan dakwah.

PKS dalam konteks pluralitas kebangsaan tetap menghormati dan menghargai adanya sikap keberagaman yang terdapat di Indonesia. Kemajemukan masyarakat adalah sebuah tantangan baru bagi PKS untuk mewujudkan cita-cita partai yakni terwujudnya masyarakat madani. Islam sebagai konsepsi dasar PKS dalam memandang permasalahan yang ada saat ini. Islam sebagai suatu ide yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan dan merupakan *Rahmatan Lil Alamin* di muka bumi ini menjadi sebuah konsep yang kuat bagi PKS dalam setiap aktifitas politiknya.

Pluralisme dalam konsep Masyarakat Madani menunjukkan kuatnya Ideologi Islam dalam penerimaan PKS terhadap konsep-konsep kebangsaan yang beragam. Namun, penulis melihat terdapat kesan ambigu yang sangat kental. Di satu wajah PKS mencitrakan diri sebagai partai inklusif dan bervisi kebangsaan, namun di wajah yang lain tampak kuat eksklusivisme Islam Ideologinya. Dari kenyataan ini memunculkan dua kemungkinan menyangkut penerimaan PKS terhadap pluralisme, Pancasila, dan demokrasi. Pertama, praktik PKS yang mengarah ke inklusivitas, dalam wujud koalisi PKS dengan berbagai partai nasionalis dan bahkan dengan partai berbasis kristen. Kedua, oleh khalayak politik PKS dimaknai dan dimaksudkan sebagai semata-mata “siasat” atau strategi sebagai sebuah pencarian titik temu yang serius.

Menurut pendapat penulis, arus kerah moderasi yang nampak jelas pada PKS. Jika dalam konsep sistem kepartaian yang rumuskan oleh

Giovanni Sratori yang melihat pada jarak ideologi diantara partai-partai politik yang ada di Indonesia, PKS digolongkan sebagai partai yang menganut sistem Kepartaian dengan model Pluralisme Moderat. Dimana terlihat adanya batas ideologi yang semakin tidak jelas diantara partai politik yang ada. Walaupun dalam PKS sendiri mereka masih menganggap citra mereka kedalam sistem kepartaian model pluralisme eskترم yang memperlihatkan eksistensi ideologi Islam dan sangat berbeda dengan partai sekuler atau nasionalis yang lain. Sangat disayangkan sekali, pernyataan ini dibantah oleh PKS sendiri. Oleh karena itu tidak bisa diingkari bahwa bagi sebagian besar berpendapat bahwa langkah-langkah yang dilakukan PKS adalah sebagai suatu langkah strategis demi kepentingan menaikkan suara pada pemilu berikutnya.

Dampak ideologi dilematis PKS membawa sejumlah perubahan dalam diri PKS yaitu perubahan perilaku individu yaitu luntarnya kesederhanaan diyakini sebagian kalangan sebagai contoh perubahan perilaku individu. Hal ini bukan merupakan fenomena umum, namun segelintir orang yang seperti itu menempati posisi kepemimpinan dan pos-pos strategis dalam struktur partai, sehingga oleh publik dianggap merupakan personifikasi PKS sebagai lembaga. Selanjutnya adalah perubahan perilaku politik, yang juga dipandang sebagai penyimpangan dari asas dan falsafah yang dibangun sejak lama, antara lain berupa kecenderungan untuk berorientasi pada kekuasaan dibandingkan moralitas dan substansi nilai-nilai yang diperjuangkan. Salah satu indikatornya, di berbagai daerah PKS mudah saja berkoalisi dengan

pihak manapun untuk maju dan memenangkan pemilukada. Hal inilah yang ditengarai membuat sementara kalangan menilai PKS sekarang sudah pragmatis.

B. Saran

Selain kesimpulan diatas penulis ingin memberikan bebarapa saran berkaitan dengan dilematis Ideologi PKS, sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya penelitian yang lebih obyektif dengan menggunakan kader PKS sebagai informan penelitian.
2. Dalam memperkuat kualitas kader yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera, hendaknya PKS lebih aktif menjaring kader melalui gerakan-gerakan dakwah yang sesuai dengan syari'at Islam sesuai dengan ideologi Islam yang menjadi dasar perjuangan PKS.
3. Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah menjadikan ideologi Islam sebagai dasar perjuangan partai, dan menempatkannya sebagai acuan dalam melakukan aktivitas-aktivitas politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

B. Buku

Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Yogyakarta: CV. Qalam, 2004.

Al-Banjari, Husain, *SA, ET, dan Prospek Partai Keadilan*, dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, ed., *Mengapa Partai Islam Kalah?* Jakarta: Alvabet, 1999.

Bubalo, Anthony, dkk., *PKS & Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir & Turki*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Fealy, Greg dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2007.

Kleden, Ignas, "Habitus: Iman dalam Perspektif Cultural Production" dalam RP Andrianus Sunarko, OFM, dkk. (eds.) *Bangkit dan Bergeraklah: Dokumentasi Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2005*, Jakarta: Sekretariat SAGKI, 2005.

Muhtadi, Burhanuddin, *Dilema PKS, Suara dan Syariah*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoder*, (Terjemahan Nurhadi), Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.

Setiawan, Bambang dan Bestian Nainggolan, ed., *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi Dan Program 2004-2009*, Jakarta: Kompas, 2004.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Supendi, Yusuf, *Replik Pengadilan: Yusuf Supendi menggugat Elite PKS*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.

Takariawan, Cahyadi, *Bukan Di Negeri Dongeng Kisah Nyata Para Pejuang Keadilan*, Jakarta: Syaamil, 2003.

Yuda, Hanta AR, *Presidensialisme Setengah Hati “Dari dilema ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

R. William Liddle, *Partisipasi Dan Partai Politik*. Penerjemah Tim Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992.

C. Jurnal dan Website

Aminuddin, KH. Hilmi, *Dari Qiyadah untuk Para Kader*. Jakarta: Bidang Arsip dan Sejarah Sekretariat Jenderat DPP PKS & Arah Press, 2007.

Baswedan, Anies Rasyid. “*Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory*”. *Asian Survey*, Vol. 44, No. 5, 2004.

Partai Keadilan Sejahtera, Platform Kebijakan Pembangunan Falsafah Dasar Perjuangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Jakarta: 2008

“Partisipasi Politik Non Muslim Dalam Partai Politik Islam (Analisa Terhadap PK Sejahtera)” (<http://garammanis.com/2010/12/21/partisipasi-politik-non-muslim-dalam-partai-politik-islam-analisa-terhadap-pk-sejahtera/>), akses 28 September 2013

“Urgensi Perbedaan Ideologi Dalam Partai Politik”, (<http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/07/16/urgensi-perbedaan-ideologi-dalam-partai-politik/>), akses 28 September 2013

Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, (Jakarta, 2007).

BIOGRAFI TOKOH

Biografi Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun. lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H./27 Mei 1332 M. adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke mana-mana.

Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula.

Selain itu dalam tugas-tugas yang diembannya penuh dengan berbagai peristiwa, baik suka dan duka. Ia pun pernah menduduki jabatan penting di Fes, Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh dinasti Fathimiyah. Dari sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental hingga saat ini. Nama dan karyanya harum dan dikenal di berbagai penjuru dunia. Panjang sekali jika kita berbicara tentang biografi Ibnu Khaldun, namun ada tiga periode yang bisa kita ingat kembali dalam perjalanan hidup beliau. Periode pertama, masa dimana Ibnu Khaldun menuntut berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yakni, ia belajar Alquran, tafsir, hadis, usul fikih, tauhid, fikih madzhab Maliki, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu balaghah, fisika dan matematika.

Dalam semua bidang studinya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dari para gurunya. Namun studinya terhenti karena penyakit pes telah melanda selatan Afrika pada tahun 749 H. yang merenggut ribuan nyawa. Ayahnya dan sebagian besar gurunya meninggal dunia. Ia pun berhijrah ke Maroko selanjutnya

ke Mesir; Periode kedua, ia terjun dalam dunia politik dan sempat menjabat berbagai posisi penting kenegaraan seperti qadhi al-qudhat (Hakim Tertinggi). Namun, akibat fitnah dari lawan-lawan politiknya, Ibnu Khaldun sempat juga dijebloskan ke dalam penjara.

Setelah keluar dari penjara, dimulailah periode ketiga kehidupan Ibnu Khaldun, yaitu berkonsentrasi pada bidang penelitian dan penulisan, ia pun melengkapinya dan merevisi catatan-catatannya yang telah lama dibuatnya. Seperti kitab *al-'ibar* (tujuh jilid) yang telah ia revisi dan ditambahnya bab-bab baru di dalamnya, nama kitab ini pun menjadi *Kitab al-'Ibar wa Diwanul Mubtada' awil Khabar fi Ayyamil 'Arab wal 'Ajam wal Barbar wa Man 'Asharahum min Dzawis Sulthan al-Akbar*.

Kitab *al-i'bar* ini pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh De Slane pada tahun 1863, dengan judul *Les Prolegomenes d'Ibn Khaldoun*. Namun pengaruhnya baru terlihat setelah 27 tahun kemudian. Tepatnya pada tahun 1890, yakni saat pendapat-pendapat Ibnu Khaldun dikaji dan diadaptasi oleh sosiolog-sosiolog Jerman dan Austria yang memberikan pencerahan bagi para sosiolog modern.

Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya, *at-Ta'riif bi Ibn Khaldun* (sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya); *Muqaddimah* (pendahuluan atas kitab *al-'ibar* yang bercorak sosiologis-historis, dan filosofis); *Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-Diin* (sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab *Muhassal Afkaar al-Mutaqaddimiin wa al-Muta'akh-khiriin* karya Imam Fakhruddin ar-Razi).

Ibnu Khaldun, ia wafat di Kairo Mesir pada saat bulan suci Ramadan tepatnya pada tanggal 25 Ramadan 808 H./19 Maret 1406 M.

Biografi Al-Mawardi

Imam al-Mawardi dilahirkan di Basrah pada tahun 364 hijrah bersamaan pada tahun 974 masehi. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang sememangnya cinta kepada ilmu pengetahuan. Keluarga beliau sentiasa mengambil berat mengenai pendidikan dan pengajiannya. Sejak kecil lagi beliau diajar al-Quran, al-Hadis, Feqah, Usul dan lain-lain dari ilmu Syariat. Di peringkat awalnya, ia mendapat bimbingan daripada Abu Qasim al-Syaimiri, seorang ulama Basrah yang terkenal ketika itu dalam bidang feqah.¹ Beliau mendengar ilmu hadis daripada beberapa ulama terkenal seperti Hasan bin Ali al-Jayli, Muhamad bin Ma'ali al-Azdi, Muhamad bin 'Adi al-Munqari.² Al-Mawardi mengambil ilmu kesusasteraan bahasa Arab dari Syeikh Abu Muhamad al-Baqi di samping berguru dengan Syeikh Abu Hamid Isfarayni.

Sejarah telah menunjukkan bahawa al-Mawardi pernah dilantik memegang jawatan kadi di beberapa buah negeri seperti di Kurat, di negeri Naisaburi sehingga beliau digelar Qadi al-Qudha. Namun demikian sesetengah ulamak seperti Abu Taib al-Tabari dan Syaimiri tidak bersetuju dengan gelaran ini. Walau bagaimanapun gelaran ini terus dikekalkan oleh sebahagian ulama yang lain pada masa itu. Buktinya gelaran itu masih lagi dikaitkan dengan namanya sehinggalah beliau wafat dan gelaran itu masih kekal sehingga ke hari ini.³

Pemikiran Politik Al-Mawardi

Sebagaimana Plato, Aristoteles dan Ibnu Abi Rabi', Mawardi juga berpendapat bahawa manusia itu adalah makhluk sosial, yang saling bekerjasama dan membantu satu sama lain, tetapi ia memasukkan agama dalam teorinya. Menurutnya kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan terdapatnya keanekaragaman dan perbezaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu. Dari sinilah akhirnya manusia sepakat untuk mendirikan Negara. Dengan demikian, adanya Negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Karena itu Mawardi berpendapat, bahwa kepala Negara merupakan lingkup garapan khalifah kenabian di dalam memelihara agama dan mengatur dunia dan mengesahkannya.

Situasi politik di dunia Islam pada masa hidupnya al-Mawardi, sama jeleknya dengan masa hidupnya al-Farabi, bahkan lebih kalut. Tetapi pendekatan Mawardi tidak sama dengan Farabi. Kalau sebagai reaksi terhadap situasi politik pada zamannya Farabi mengembangkan teori politik yang serba sempurna – yang demikian sempurna sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh dan untuk umat manusia yang bukan malaikat, maka Mawardi tidak demikian halnya. Dia mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistis menawarkan saran-saran perbaikan atau formasi, misalnya dengan mempertahankan status quo. Dia menekankan bahwa khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy dan begitu juga dengan pembantu khalifah lainnya.

Upaya Mawardi mempertahankan etnis Quraisy, secara kontekstual interpretatif dapat dikatakan, bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisynya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Maka mengutamakan etnis Quraisy memang bukan ajaran dasar agama Islam yang dibawa Rasulullah, karena itu hadist-hadist yang mengutamakan etnis Quraisy harus dipahami sebagai ajaran yang bersifat temporal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ach. Basyir
Tempat & Tanggal Lahir : Sumenep, 15 januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah : H. saed
Nama Ibu : ST. Rodhiyah
Alamat Asal : Sumenep, Madura

RIWAYAT PENDIDIKAN

- MI Al-Huda 11 Gapura Timur, Sumenep, Madura (1996-2001)
- MTs Madrasah Tarbiyah Islamiyah Gapura Timur, Sumenep, Madura, (2003-2005)
- MA Madrasah Tarbiyah Islamiyah Gapura Timur, Sumenep, Madura (2005-2008)
- S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2014)

RIWAYAT ORGANISASI

- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia / PMII (2008-2010)